

ABSTRAK

KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI KOTA BANDAR LAMPUNG

**Oleh:
DWI NURHAYATI**

Kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan indikator penting keberhasilan pemungutan pajak daerah. PKB sebagai pajak provinsi diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 sebagai pedoman optimalisasi pemungutan pajak. Di Provinsi Lampung, pelaksanaannya diatur melalui Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2024 dan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2024. Pemerintah Kota Bandar Lampung telah melakukan berbagai upaya seperti penyederhanaan administrasi, peningkatan layanan, dan pemberian insentif. Namun masih dijumpai penundaan pembayaran, di mana sebagian wajib pajak menunggu program pemutihan. Hal ini menunjukkan bahwa kepatuhan masyarakat belum sepenuhnya didasari kesadaran hukum, melainkan bersifat administratif dan situasional. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini merumuskan dua permasalahan: (1) bagaimana kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Bandar Lampung; dan (2) bagaimana faktor yang mempengaruhi kepatuhan tersebut.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan data primer dari wawancara bersama Bapenda Provinsi Lampung, Samsat Induk I Rajabasa, dan menyebar Kuesioner *online* kepada wajib pajak. Analisis dilakukan secara deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) tingkat kepatuhan wajib pajak tergolong sangat patuh, dengan capaian lebih dari 85 persen dari target penerimaan, namun masih bersifat formal dan instrumental karena sebagian besar wajib pajak membayar saat program pemutihan atau sanksi administratif. Berdasarkan teori kesadaran hukum Soerjono Soekanto, mayoritas wajib pajak baru berada pada tahap mengetahui hukum (*law awareness*). (2) Faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan meliputi kebijakan pemutihan, inovasi pelayanan, sosialisasi, penegakan hukum, kondisi ekonomi, budaya pajak sebagai beban, rendahnya kesadaran hukum, dan ketergantungan pada program pemutihan.

Kata kunci: Kepatuhan Pajak, wajib pajak, pajak kendaraan bermotor

ABSTRACT

TAXPAYER COMPLIANCE IN PAYING MOTOR VEHICLE TAX IN BANDAR LAMPUNG CITY

**By:
DWI NURHAYATI**

Taxpayer compliance in paying Motor Vehicle Tax (PKB) is an important indicator of the success of local tax collection. PKB, as a provincial tax, is regulated in Law Number 1 of 2022 and Government Regulation Number 35 of 2023 as guidelines for optimizing tax collection. In Lampung Province, its implementation is regulated through Lampung Provincial Regulation Number 4 of 2024 and Bandar Lampung City Regulation Number 1 of 2024. The Bandar Lampung City Government has made various efforts such as simplifying administration, improving services, and providing incentives. However, there are still delays in payment, with some taxpayers waiting for the amnesty program. This shows that public compliance is not yet fully based on legal awareness, but rather is administrative and situational in nature. Based on this, this study formulates two problems: (1) how compliant are taxpayers in paying Motor Vehicle Tax in Bandar Lampung City; and (2) what factors influence this compliance.

This study uses an empirical juridical approach with primary data from interviews with the Lampung Provincial Revenue Agency, Rajabasa Main Samsat, and an online questionnaire distributed to taxpayers. The analysis was conducted using descriptive qualitative methods.

The results of the study show that (1) the level of taxpayer compliance is classified as very compliant, with an achievement of more than 85 percent of the revenue target, but it is still formal and instrumental because most taxpayers pay during amnesty programs or administrative sanctions. Based on Soerjono Soekanto's theory of legal awareness, the majority of taxpayers are only at the stage of knowing the law (law awareness). (2) Factors that influence compliance include amnesty policies, service innovation, socialization, law enforcement, economic conditions, tax culture as a burden, low legal awareness, and dependence on amnesty programs.

Keywords: Tax Compliance, taxpayers, motor vehicle tax